

## **MEMBACA ULANG KONSEP MODERNISASI POLITIK, PEMBANGUNAN POLITIK, DAN DEMOKRASI**

**Felix Tawaang,<sup>1</sup> Ari Cahyo Nugroho,<sup>2</sup> Bambang Mudjiyanto,<sup>3</sup> Launa<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Peneliti Bidang Ilmu Sosial Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

<sup>4</sup>Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bung Karno

*Email:* <sup>1</sup>feltashome@yahoo.co.id, <sup>2</sup>aricahyonugroho@gmail.com,

<sup>3</sup>bamb065@brin.go.id, <sup>4</sup>launa2011@gmail.com

### **ABSTRAK**

Kajian ini membahas tiga tema penting yang mendasari konsep utama dalam studi ilmu politik, yakni modernisasi politik, pembangunan politik, dan demokrasi. Dalam berbagai literatur ilmu politik, ketiga tema ini selalu mendapat porsi bahasan penting dari para ahli ilmu politik untuk menganalisis isu budaya politik, watak kekuasaan, proses pelembagaan politik, partai politik, birokrasi, institusi demokrasi (parlemen) atau institusi peradilan serta tema-tema yang lebih kontemporer semisal dinamika pemilu, kelompok kepentingan atau kelompok penekan, perilaku pemilih, atau peran politik media massa. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode analisis deskriptif berbasis data studi pustaka. Studi ini berkesimpulan, bahwa rasionalitas politik, kapasitas sistem, dan kesiapan transformasi budaya politik warga tidak cukup efektif menjadi prasyarat modernisasi dan pembangunan politik, tanpa dibarengi kesadaran, pengetahuan, kemampuan adaptasi, dan akseptabilitas elite politik dan warga negara dalam menerima berbagai bentuk perubahan sebagai konsekuensi modernisasi politik. Perangkat demokrasi lokal juga akan sulit bekerja efektif jika modernisasi politik gagal dalam mengadaptasi kearifan lokal dan budaya politik 'gaya Asia' yang masih eksis dari bangsa bersangkutan.

Kata kunci: Modernisasi politik, pembangunan politik, demokrasi.

### **PENDAHULUAN**

Dalam studi ilmu politik, terutama untuk memahami dinamika dan karakter sistem politik di negara-negara sedang berkembang (NSB), para ahli ilmu politik kerap menggunakan konsep modernisasi politik dan pembangunan politik secara bergantian (jika bukan secara bersamaan) untuk menjelaskan tentang pentingnya proses rasionalisasi, transformasi, institusionalisasi, dan modernisasi politik sebagai prasyarat penting dalam pengelolaan sistem demokrasi dan kekuasaan yang logis, rasional, dan akuntabel.

Menurut Janicki (1993), juga Kernbergian dan Warden (2001), konsep modernisasi politik juga kerap digunakan sebagai acuan konseptual untuk melihat sejarah dinamis perjalanan politik negara berbasis bangsa. A

rtinya, modernisasi politik juga mengacu pada fokus kajian tentang sukses tidaknya kontinum dari proses transformasi struktural dalam kehidupan politik dan masyarakat suatu bangsa. Dalam pengertian ini, modernisasi politik adalah sebuah proses yang bersifat dinamis; sebuah aktivitas kontinyu pengondisian formasi pergeseran struktural dari jenis pemerintah tradisional ke sistem pemerintahan modern (*shifts from traditional government to modern government*) (Hasan, 2021: 41).

Sementara menurut Arts dan Tatenhove (2006: 21), konsep modernisasi politik dan pembangunan politik adalah dua gagasan kunci dalam studi ilmu politik yang melandasi konsep penatakelolaan kebijakan negara yang terkait dengan institusi demokrasi. Kedua gagasan ini mencoba menyingkap sekaligus mengelobarasi proses transformasi struktural yang berlangsung pada tatanan politik masyarakat kontemporer, dengan konsekuensi kemampuan sistem politik dalam mengintegrasikan dirinya dengan praktik modernisasi. Bagi Huntington dan Nelson (1976), konsekuensi logis dari tuntutan integrasi dengan gagasan modernisasi adalah terkait dengan sejauh mana kapasitas integratif sebuah sistem politik mampu berelasi secara efektif dengan skenario politik modern, seperti gaya komunikasi politik dan sosialisasi politik, format pertumbuhan ekonomi, desain urbanisasi, pendidikan dan ketenagakerjaan serta aspek-aspek penting lain dalam kehidupan negara.

Namun demikian, konsep modernisasi politik dan pembangunan politik kerap dimaknai secara berbeda oleh para ahli. Beberapa ahli politik menggunakannya sebagai program untuk melakukan reformasi institusi politik dan demokrasi. Ahli yang lain coba merealisasikan konsep tersebut secara langsung dengan debat tata kelola (*governance*) yang melampaui fokus kajian politik yang bersifat normatif dan lokalistik. Sementara ahli lain juga berasumsi bahwa modernisasi politik dan pembangunan politik adalah bagian dari konsep utama modernisasi politik. Tujuannya, untuk memahami transformasi struktural dalam kaitannya dengan praktik politik di negara-negara demokrasi, khususnya di NSB, menyangkut transformasi aspek otoritas politik, identitas nasional, kesetaraan, keadilan, dan kepemimpinan. Singkatnya memahami secara dinamis-mutualis interaksi antara institusi politik dengan pertumbuhan ekonomi dan kaitannya dengan nilai-nilai budaya serta aspek lain dari kehidupan sosial politik yang ada suatu negara (Rustow, 1968: 40-41).

Modernisasi politik dan pembangunan politik, secara umum juga dimaknai sebagai acuan untuk memahami bagaimana perubahan budaya politik dan transformasi institusi politik dapat berlangsung efektif, sebagai dampak dari berlangsungnya proses modernisasi politik di banyak negara di dunia pasca Perang Dunia ke-2 (PD 2). Tujuan perubahan

institusi politik dan budaya politik mengarah pada percepatan dan integrasi sistem politik ke dalam proses modernisasi politik, di mana standar kinerja dan pencapaian dapat diperoleh oleh masyarakat yang kurang berkembang. Seperti halnya perkembangan politik, sangat sulit untuk memberikan definisi yang tepat tentang modernisasi politik. Modernisasi politik adalah proses yang dilatari oleh kemampuan pemanfaatan sumberdaya negara secara rasional dengan maksud membentuk tatanan masyarakat (politik) modern.

Istilah masyarakat modern merujuk pada struktur masyarakat yang dicirikan oleh penerapan teknologi, kesaling-tergantungan sosial yang luas, urbanisasi, literasi, mobilitas sosial, dan faktor dinamis lainnya. Dalam konteks masyarakat Barat, modernisasi telah menghasilkan marjinalisasi politik masyarakat tradisional di satu sisi, serta kebangkitan masyarakat modern pada sisi lain, yakni sebuah masyarakat yang mendasarkan dirinya pada ilmu pengetahuan, logika *hi-tech*, relasi sosial kompetitif, tata kelola pemerintahan yang rasional, fokus pada keadilan dan kesetaraan, konsen pada hak-hak publik, dan kosmologi hidup yang individual, liberal, dan sekuler (<http://www.iilsindia.com>).

Kamus Oxford juga memberi definisi pembangunan politik sebagai “upaya peningkatan kapasitas negara untuk memobilisasi dan mengalokasikan sumberdaya, memproses input politik menjadi output (kebijakan) yang dapat diimplementasikan, membantu pemecahan masalah, adaptasi atas perubahan lingkungan, dan realisasi tujuan. Gagasan kontemporer tentang pemerintahan yang baik juga fokus pada administrasi publik yang efisien, efektif, dan tidak koruptif” (*“Political development enhances the state's capacity to mobilize and allocate resources, to process policy inputs into implementable outputs. This assists with problem-solving and adaptation to environmental changes and goal realization. The contemporary notion of good governance also dwells on efficient, effective, and non-corrupt public administration”*) (<https://www-oxfordreference-com>).

Sementara dalam konteks masyarakat (politik) modern, ciri yang melekat antara lain: ada legitimasi politik dan otoritas hukum (Max Weber); ada alokasi nilai yang bersifat otoritatif (David Easton); ada kekuasaan, aturan, dan otoritas yang bisa memaksa warga negara patuh pada keputusan (Robert Dahl). Sementara Gabriel Almond mendefinisikan masyarakat (politik) modern sebagai entitas yang hidup dengan ciri:

“Ada interaksi (dinamis) di antara semua lembaga formal dan informal; berfungsinya lembaga-lembaga pemerintahan, seperti legislatif, eksekutif, pengadilan, badan-badan administratif tetapi semua struktur dalam aspek politiknya; Diantaranya termasuk organisasi formal seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan media komunikasi; struktur tradisional seperti ikatan kekerabatan, pengelompokan kasta dan fenomena anomik, seperti perkumpulan, kerusuhan, dan demonstrasi” (Pooja, n.d).

Studi ini bersifat repetitif, yakni mencoba mengkaji ulang konsepsi modernisasi politik, pembangunan politik, dan demokrasi sebagai tema sentral dalam studi ilmu politik. Tujuan studi adalah *me-refresh* kembali gagasan-gagasan utama dari konsep modernisasi politik, pembangunan politik, dan demokrasi yang tetap *update* dalam realitas kehidupan politik modern saat ini. Adapun tujuan studi adalah: (1) untuk memahami konsep modernisasi politik dan pembangunan politik sebagai salah satu konsep kunci dalam studi ilmu politik; dan (2) untuk memahami konsepsi sekaligus menyingkap realitas aktual praktik demokrasi sebagai premis utama yang mendasari mekanisme politik dalam kehidupan politik modern di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.

Secara metodologis, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena studi ini fokus pada review tiga konsep utama kajian: modernisasi politik, pembangunan politik, dan demokrasi, melalui analisis deskriptif berbasis studi pustaka. Penggunaan metode deskriptif ditujukan untuk menyajikan gambaran obyek penelitian secara sistematis terkait data, fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1988); untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tanpa membuat kesimpulan secara lebih luas (Sugiyono, 2005), namun melalui suatu penelusuran data pemahaman atas fakta-fakta empirik dengan interpretasi yang tepat (Whitney, 1960).

Teknik pengumpulan data dalam studi ini bersifat dokumentatif melalui empat tahap konstruksi data berikut: (1) pengumpulan dan identifikasi data; (2) kategorisasi, klasifikasi, dan komparasi data; (3) interpretasi dan analisis; dan (4) penarikan kesimpulan.

## **KAJIAN TEORI**

Modernisasi politik, pembangunan politik, dan demokrasi merupakan tiga isu utama dalam memahami realitas kehidupan politik di NSB, termasuk Indonesia. Ketiga konsep tersebut awalnya juga digunakan untuk memahami fenomena umum “gelombang demokratisasi” yang berlangsung di hampir seluruh negara di dunia (Huntington, 1995). Proses modernisasi politik (rasionalisasi, efisiensi, dan manajemen politik), proses pembangunan politik (penataan sistem politik dan proses institusionalisasi politik), dan proses demokrasi (partisipasi politik, rekrutmen politik, sosialisasi politik, komunikasi politik, dan sirkulasi kepemimpinan politik secara prosedural, reguler, terbuka, dan terlembaga dalam kehidupan sistem politik) menjadi menu utama kajian.

Modernisasi politik, pembangunan politik, dan demokrasi merupakan konsekuensi dari berlangsungnya perdebatan pemikiran tentang negara-bangsa yang menguat sejak tampilnya era pemikiran kritis-rasional yang dipelopori para filsuf dan pemikir modern

yang tumbuh subur di Eropa pada masa *renaissance* di abad ke-14 dan ke-15, dan terus berlanjut ke masa pencerahan (*aufklärung*) di abad ke-17 dan ke-18 (Browning, 2017).

Bahkan jika kita melacak lebih jauh, pemikiran kritis tentang negara dan kekuasaan telah dirintis sejak masa filsafat era klasik dan abad pertengahan. Sokrates ( $\pm$  470-399 SM) misalnya, adalah filsuf yang memperkenalkan logika deduktif-rasionalis, yakni gagasan negara yang mencakup ide negara obyektif dan hukum obyektif; etika kekuasaan; kebajikan atau *virtue*. Plato ( $\pm$  428-348 SM) memperkenalkan logika deskriptif-imaginatif; negara sebagai *bonum commune*; negara kolektivistis, negara sebagai antitesa kebebasan dan individualisme. Aristoteles ( $\pm$  384-322 SM) memperkenalkan logika induktif-empiris tentang negara; kebebasan dan hak milik individu; negara memiliki kedaulatan tertinggi tapi harus dibatasi; negara pewujud kesejahteraan umum (Bertens, 1981; Turner, 2016).

Sementara gagasan filsafat modern—yang antara lain dimotori oleh Rene Descartes (1596-1650) sebagai pelopor aliran rasionalisme (rasio menjadi akal-budi tertinggi; *cogito ergo sum*), John Locke (1632-1704) dan David Hume (1711-1776) sebagai pelopor aliran empiris (keberanan harus bersifat nyata, faktual, dan bisa dilihat/diamati eksistensinya secara empiris), Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), F.W Joseph Schelling (1775-1854), G.W Friederich Hegel (1770-1831), dan Arthur Schopenhauer (1788-1860) sebagai pelopor aliran idealisme (kebenaran obyektif bersumber dari ide atau kekuatan akal-budi manusia). Berikutnya Saint Simon (1760-1825). Berikutnya adalah Auguste Comte (1798-1857), John Stuart Mill (1806-1873), dan Herbert Spencer (1820-1903) sebagai pelopor aliran positivisme (kebenaran adalah hasil dari pemikiran positif manusia; menolak asumsi-asumsi pemikiran teologi dan metafisik yang dianggap abstrak, tidak ilmiah, dan subjektif), serta berlanjut pada pemikiran Immanuel Kant (1704-1824), Baruch Spinoza (1632-1677), Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) dan beberapa tokoh lainnya sebagai pelopor aliran kritisisme (kritis terhadap faham rasionalisme, empirisme, dan positivisme; meyakini kekuatan rasio, namun rasio manusia tetap memiliki keterbatasan; kritisisme sebagai sintesis dari faham rasionalisme dan empirisme). Semua faham/aliran filsafat modern itu menjadi fondasi dasar bagi konstruksi intelektual filsafat politik Barat (empiris-positivis-rasional); yang dikemudian hari banyak digunakan sebagai landasan ilmiah untuk membahas hakikat negara, kekuasaan, dan masyarakat (Bertens, 1981; Hardiman, 2004).

Dengan demikian, gagasan tentang modernisasi politik, pembangunan politik, dan demokrasi jelas tidak bisa dilepaskan dari dinamika perkembangan faham pemikiran filsafat abad klasik ( $\pm$  abad 5 - 2 SM) dan filsafat abad pertengahan ( $\pm$  abad 5 - 16 masehi).

Sebagai referensi penting dalam memahami kehidupan politik modern, pemikiran filsafat modern ditandai oleh dua ciri utama: (1) makin berkurangnya dominasi otoritas kekuasaan gereja (yang bersifat spekulatif-teologis-metafisik-dogmatis); dan (2) makin menguatnya pengaruh ilmu pengetahuan (faham positivis, empiris, rasional, dan kritis). Menguatnya pengaruh pemikiran filsafat modern yang berbasis ilmu pengetahuan itu telah berdampak pada peradaban dan kebudayaan politik modern mengalami rasionalisasi dan obyektivisasi (penguatan akal, rasio, dan sikap kritis) *dus* menegasi pengaruh dogmatis-teologis gereja.

Semenjak awal abad ke-19, kajian-kajian tentang politik negara, politik kekuasaan, masyarakat politik, dan faham demokrasi sepenuhnya telah meninggalkan faham teologis-metafisik—mengkaji obyek yang bersifat spekulatif atau *pseudo problems*, seperti hakekat keberadaan (*being*), hakekat eksistensi (*existence*), hakekat ada dan tiada (*being and nothingness*), dan hakikat perubahan dan ketetapan (*changes and permanance*)—dan mengikuti kebenaran logis pemikiran filsafat modern yang berbasis pada fakta empirik dan pemikiran yang rasional, obyektif, kritis, dan empirik (Mustansyir, 1997: 3). Kebenaran ilmiah harus bis diuji/dibuktikan secara ilmiah. Kebenaran obyektif-positif yang dihasilkan *science* modern tidak bersifat tetap. Ia bisa berubah, bisa dikoreksi, dan bisa difalsifikasi. Kebenaran ilmiah merupakan “*a never ending process*”. Ia tidak berhenti di ruang hampa (*social vacuum*) atau selesai dalam kebekuan pikiran normatif-dogmatis (Girifalco, 2007).

Modernisasi politik (secara konseptual merupakan bagian dari kajian pembangunan politik) adalah sebuah konsep yang meyakini bahwa pengelolaan politik negara harus bersifat obyektif, positif, rasional, dan ilmiah. Keyakinan ini menjadi fondasi penting bagi logika dan konsep modernisasi politik. Robert Ward dan Dankward Rustow (1964) misalnya, memahami modernisasi sebagai gerakan menuju masyarakat modern yang ditandai oleh kapasitas sistem politik untuk memengaruhi atau mengreasi terbangunnya sikap-mental warga negara yang rasional, adaptif, dan siap menerima perubahan dalam kehidupan politik negara yang berlangsung intens dan kontinyu (Budiardjo, 2015).

Modernisasi politik kerap dikaitkan dengan proses transformasi sosial-politik yang berlangsung di Eropa, yang gagasannya telah diletakkan sejak masa awal *renaissance*. Dalam konteks sosiologi, gagasan modernisasi politik sepertinya mengadopsi gagasan industrialisasi atau modernisasi masyarakat, yakni cara hidup masyarakat (industri) modern yang berinti pada ekonomisasi, otomatiasi teknologi, urbanisasi, dan sekularisasi (Kumar, 2020). Modernisasi sosial dan transformasi politik juga membutuhkan kriteria, seperti: rasionalitas, efisiensi, akuntabilitas, penguatan peran politik negara, peningkatan kapasitas

sistem politik; diferensiasi, spesialisasi, identifikasi, alokasi, integrasi, dan kesinambungan dalam kebijakan publik beserta implementasinya; ada kesempatan partisipasi aktif warga negara untuk bersaing secara sehat, bebas, dan terbuka dalam meraih jabatan-jabatan politik, publik, dan pemerintahan; adanya pemisahan antara urusan agama dan publik (program sekularisasi) serta relasi sinergis antara pemerintah pusat dan daerah.

Sementara di lain pihak, pembangunan politik dan demokrasi (sebagai dua tema penting dalam studi politik modern) juga harus memastikan bahwa penguatan peran negara bisa berjalan seiring dengan penguatan posisi masyarakat dalam proses pembangunan politik, tersemainya kebebasan politik, terjaminnya kesejahteraan publik, terwujudnya kepastian hukum, terlindunginya hak asasi manusia, terbangunnya sikap aparat sipil negara yang berorientasi pelayanan (*public servant*), terkonstruksinya aparat kekerasan negara (polisi, militer, hakim, dan jaksa) yang tunduk pada konstitusi dan peraturan perundangan serta bersedia berada di bawah kontrol otoritas pemerintahan sipil. Aspek penting lain, memungkinkan berlangsungnya proses pelembagaan politik, desentralisasi kebijakan, penguatan keadilan, nilai dan prinsip demokrasi, ada mekanisme sinergis antara pembangunan politik dengan pembangunan sektor lainnya (seperti penguatan ideologi, pembangunan pertahanan-keamanan, sosial-budaya, ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi) dalam kerangka pembangunan politik yang utuh-menyeluruh.

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep Modernisasi Politik**

Secara historis, modernisasi politik merupakan proses perubahan terhadap sistem politik (termasuk sistem sosial dan budaya) yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara sejak abad ke-17 hingga abad ke-19. Gagasan modernisasi kemudian menyebar ke berbagai belahan negara Eropa lainnya. Proyek modernisasi politik juga diimpor ke negara-negara dunia ketiga (atau negara pascakolonial meminjam istilah Hamza Alavi) pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, seperti di negara-negara kawasan Amerika Selatan serta negara-negara di wilayah Asia dan Afrika.

Secara historis, konsepsi modernisasi berkembang dalam tiga fase. Fase pertama antar 1950-an dan 1960-an, fase kedua tahun 1970-an dan 1980-an, dan fase ketiga tahun 1990-an. Kelahiran teori modernisasi setidaknya dilatari oleh tiga peristiwa penting dunia, yakni: (1) penataan kehidupan negara pasca PD ke-2; (2) munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemon dunia (*super power*); dan (3) perluasan gerakan komunis yang

dipelopori Uni Soviet. Menurut Suwarsono dan So (2006: 95-96), ada pengaruh teori sosial yang melatari lahirnya teori modernisasi, yaitu teori evolusi dan teori fungsionalisme.

*Pertama*, teori evolusi yang menggambarkan proses evolusi masyarakat dalam dua hal: (a) asumsi bahwa perubahan sosial merupakan gerakan satu arah, seperti garis lurus (bersifat linear). Masyarakat adalah sebuah organisme yang berkembang, dari masyarakat primitif menuju masyarakat maju; (b) asumsi subjektif teori evolusi tentang nilai dan tujuan akhir perubahan sosial, yakni perubahan (dari ciri masyarakat tradisional menuju tatanan) masyarakat modern sebagai sesuatu yang niscaya dan tak mungkin dihindari.

*Kedua*, teori fungsionalisme, yang merupakan hasil pemikiran sosiolog Talcott Parsons. Melalui analisis fungsionalismenya, Parsons berasumsi bahwa struktur sosial masyarakat seperti organisme tubuh manusia: (a) manusia memiliki struktur tubuh bagian yang saling terhubung satu sama lain, dan karenanya masyarakat memiliki berbagai kelembagaan yang juga saling terkait satu sama lain; dan (b) setiap bagian tubuh manusia memiliki fungsi unik dan khas, maka bentuk kelembagaan dalam masyarakat pun memiliki fungsi yang unik dan khas pula (ada fungsi diferensiasi, spesialisasi, dan fungsi integrasi).

Di sisi lain, menurut versi Huntington (1971: 283), konsep modernisasi politik tumbuh seiring kebangkitan studi politik komparatif yang berlangsung pada pertengahan 1950-an, yakni adanya perhatian terhadap perbandingan modernisasi antara sistem politik modern dan sistem politik tradisional. Studi modernisasi politik dianalisis melalui pendekatan pembangunan politik, antara lain melalui teori sistem, analisis statistik, dan sejarah perbandingan. Konsentrasi pada dinamika dan perkembangan politik pada gilirannya menghasilkan upaya lebih luas dan serius untuk menghasilkan teori-teori yang lebih umum tentang perubahan politik yang berlangsung intens dan dramatis di akhir tahun 1960-an. Fokus dalam pembahasan ini adalah pada teori umum modernisasi (modernisasi dalam sejarah intelektual), konsep diseperti pembangunan politik (definisi konsep konseptual dan pendekatan studi pembangunan politik), dan teori-teori perubahan politik.

Berikutnya, Hamza Alavi dalam *The State in Postcolonial Societies: Pakistan and Bangladesh* (1972: 61-62) menyebut bahwa kemandekan demokrasi yang secara umum terjadi di negara-negara pascakolonial atau NSB adalah intensitas konflik sosial, menguatkannya fragmentasi elite-masyarakat, problem etnonasionalisme, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan gap pendidikan di antara kelompok elite-menengah dan kelompok bawah. Alavi juga meyakini bahwa rezim negara pascakolonial diisi oleh kontestasi ideologi maupun rivalitas antarelite maupun konflik di antara kelompok-



kelompok masyarakat. Menurut Jati (2013: 137), adanya relasi antara elite dan masyarakat yang renggang menunjukkan adanya fragmentasi kelas dalam negara pascakolonial seperti halnya kelas birokrasi, kelas borjuasi, maupun kelas masyarakat. Ketiga kelas tersebut memang saling terpecah (fragmentasi), namun juga saling tergantung (dependensi). Semua masalah itu terjadi karena masih mengakarnya sistem kolonialisme dalam rezim negara modern, baik dalam sistem pemerintahan maupun sistem sosial.

Secara konseptual, teori modernisasi politik yang dikembangkan oleh para ilmuwan sosial dan politik Barat—dimana beberapa gagasan dasarnya dirintis dari teori modernisasi ekonomi yang dikembangkan oleh W.W. Rostow (dalam *The Stages of Economic Growth A Non-Communist Manifesto*, 1960), juga Alex Inkeles dan David H. Smith (dalam *Becoming Modern; Individual Change in Six Development Countries*, 1974)—yang memokuskan kajiannya pada bagaimana proyek modernisasi dilakukan melalui proses perubahan mental, transformasi sosial-budaya, dan transisi politik di NSB yang sistem sosial, politik, dan (mental) budayanya dianggap masih ‘tradisional’ atau ‘terkebelakang’.

Tujuan transformasi budaya, perubahan mental masyarakat, dan transisi politik di NSB dirancang secara sistematis dan programatis untuk disuntikkan sebagai vitamin baru bagi perluasan proyek liberalisasi sosial, liberalisasi politik, dan liberalisasi budaya melalui pengadopsian logika dan cara berpikir modernitas seperti yang berlangsung dalam struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Barat Barat. Strategi yang di injeksi berupa serangkaian program, seperti resformasi kelembagaan sosial, revitalisasi dan reorganisasi struktur politik, adopsi model pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur politik, termasuk rekayasa dalam kehidupan sosial dan budaya (Budiman, 1995)

Sementara tujuan dari proyek globalisasi atau mondialisasi gagasan modernisasi politik adalah agar negara di berbagai belahan dunia dapat segera mengintegrasikan dirinya ke dalam tahap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial-budaya masyarakat modern (Barat) yang berciri industrial, rasional, efisien, dan kompetitif. Gagasan modernisasi politik meyakini bahwa hal utama yang mesti segera dilakukan untuk memodernisasi kehidupan politik masyarakat adalah dengan merubah cara pandang (*mindset*) yang tradisional (melalui rekayasa mental, perubahan orientasi dan nilai-nilai sosial, integrasi sistem dan struktur ekonomi serta transformasi budaya) menuju cara pandang modern menurut ukuran masyarakat Barat yang rasional (Armer & Katsillis, 1992).

Bagi Lucian Pye (1979: 28) dan Sudarsono (1982), fenomena modernisasi politik yang berlangsung di berbagai belahan negara di dunia, terutama di NSB, akan selalu

membawa dampak ikutan, yakni ketegangan dan konflik, karena proses modernisasi politik di satu sisi mensyaratkan adanya perubahan nilai dan kelembagaan sistem politik secara sistematis, struktural, dan kontinyu; sementara pada sisi lain, modernisasi politik juga harus memastikan kapasitas stabilitas, kohesifitas, dan integrasi sistem politik. Ketegangan maupun konflik merupakan sesuatu inheren dalam proses modernisasi politik, yang antara lain dicirikan oleh tuntutan akan persamaan hak-hak politik, proses diferensiasi sosial, serta kapasitas sistem politik dalam mengakomodasi berbagai kepentingan, aspirasi, dan harapan masyarakat yang makin meluas, kompleks, dan rumit.

Menurut Lucian Pye (1979: 32) dimensi modernisasi politik mencakup: (1) pengalokasian nilai-nilai persamaan (*equality*) di antara individu warga negara dalam relasinya dengan sistem politik; (2) tambahan kemampuan (*capacity*) sistem politik dalam relasinya dengan lingkungan; dan (3) berlangsungnya proses diferensiasi dan spesialisasi institusi dan struktur politik secara teratur dan terlembaga dalam sistem politik. Ketiga dimensi modernisasi politik versi Pye tersebut, menurut Harjanto (1979), dinisbatkan sebagai prasyarat utama dari setiap proses modernisasi politik atau pembangunan politik.

Sementara bagi Claude Emerson Welch (1971), modernisasi politik adalah sebuah proses yang juga harus dilandasi oleh tiga kriteria pokok: (1) peningkatan dan pemusatan kekuasaan pada negara, yang berjalan seiring dengan melemahnya sumber-sumber kewenangan kekuasaan tradisional; (2) diferensiasi dan spesialisasi lembaga-lebaga politik; dan (3) peningkatan partisipasi rakyat dalam politik dan kesediaan individu-individu dan kelompok-kelompok warga negara untuk mengidentifikasi dirinya ke dalam sistem politik sebagai wadah tunggal dan formal dalam kehidupan politik modern. Jadi, modernisasi politik pertama-tama menyangkut kesediaan untuk meninggalkan budaya politik tradisional dan secara dramatis juga kesediaan untuk mengalihkan otoritas atau kewenangan kekuasaan politik yang berciri tradisional (non-demokratis) ke dalam desain sistem politik yang berciri modern-rasional (demokratis).

Di sisi lain, Huntington (1971) melihat modernisasi politik sebagai salah satu aspek terpenting dari pembangunan politik. Sistem politik yang telah di modernisasi dirinya akan menjadi rumit dan kompleks, karena modernisasi politik akan melipatgandakan volume, ruang lingkup, dan efisiensi keputusan-keputusan resmi; lembaga pemerintahan harus mengembangkan tingkat diferensiasi struktural dan spesialisasi fungsional yang tinggi. Menurut Huntington (1971), pola modernisasi politik yang teratur mensyaratkan adanya

transformasi nilai, orientasi, dan sikap, yaitu perubahan secara dramatis praktek-praktek sosial-politik yang bersifat tradisional menuju kehidupan politik modern, yang meliputi:

1. Rasionalisasi kekuasaan: pergantian elite politik tradisional—berbasis etnis, keagamaan atau kekeluargaan—oleh kekuasaan politik nasional yang kuat, terpusat, dan sekuler;
2. Diferensiasi: hadirnya fungsi politik baru dan pengembangan struktur khusus sebagai pelaksanaan seluruh fungsi sistem politik secara efisien, terukur, terencana, dan efektif;
3. Otoritas khusus: kewenangan khusus bidang hukum, militer, administratif, dan ilmu pengetahuan yang mandiri dan terspesialisasi (terpisah dari dunia politik), hirarki administrasi yang bersiat formal, rinci, kompleks, disiplin, dan hirarkis. Jabatan dan kekuasaan didistribusikan berbasis prestasi kerja bukan berbasis pola nepotisme; dan
4. Partisipasi politik massif: melibatkan peran serta politik seluruh lapisan masyarakat, meningkatnya kontrol/pengawasan masyarakat terhadap pemerintah/penguasa, dan warga negara terlibat langsung dalam memengaruhi jalannya roda pemerintahan.

Dalam tesisnya, Huntington (1971) juga mengetengahkan beberapa ciri pokok modernisasi politik yang mencakup lingkup yang relatif luas dan sebangun dengan ide-ide modernisasi yang berlangsung di negara-negara Barat, seperti:

1. Modernisasi sebagai proses revolusioner, karena perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern melibatkan perubahan fundamental dan radikal dalam pola-pola hidup manusia;
2. Modernisasi politik merupakan proses yang rumit, karena melibatkan perubahan hampir di semua aspek dan lini kehidupan manusia yang terkait dengan fenomena industrialisasi, urbanisasi, mobilisasi sosial, diferensiasi, sekularisasi, perluasan media, peningkatan tahap literasi dan perluasan partisipasi politik;
3. Modernisasi merupakan proses yang sistematis. Perubahan dalam satu bidang/aspek akan membawa perubahan atau setidaknya memengaruhi bidang/aspek lain;
4. Modernisasi adalah suatu proses global, akibat penyebaran gagasan-gagasan dan teknik-teknik modern dalam kehidupan di seluruh penjuru dunia;
5. Modernisasi merupakan proses jangka panjang. Pada tahap awal perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, proses modernisasi memang terlihat revolusioner, namun secara keseluruhan, proses modernisasi hanya mungkin terjadi dalam proses yang evolutif atau bersifat jangka panjang;
6. Modernisasi merupakan proses yang tahapannya bersifat sistematis, terencana, terlembaga, kontinyu, dan simultan;

7. Modernisasi merupakan proses homogenitas. Dengan modernisasi akan terbentuk berbagai macam masyarakat dengan struktur dan pola yang berbeda, karena modernisasi meliputi gerak menuju kesaling-tergantungan antar masyarakat politik ke arah proses pelembagaan dan integrasi politik masyarakat;
8. Modernisasi merupakan proses yang selalu bergerak ke depan. Meskipun pada beberapa kasus ada kemungkinan berhenti atau mundur sementara, tetapi proses modernisasi akan terus bergerak maju dan tidak bisa dihentikan; dan
9. Modernisasi merupakan proses yang bersifat progresif. Dalam jangka panjang, modernisasi politik akan meningkatkan kesejahteraan manusia, baik secara psikis, kultural maupun material.

Bisa kita katakan, pasca PD ke-2, dominasi intelektual negara-negara kapitalis Barat atas kepentingannya di NSB/negara pascakolonial, tidak hanya fokus pada isu bisnis internasional, impor murah bahan mentah, membuka pasar-pasar baru, namun mereka juga meyakini bahwa asistensi pembangunan, *support* finansial dan teknologi secara masif akan menjadi *panasea* bagi mentransformasi masyarakat agraris yang berciri subsisten menjadi masyarakat industri modern. Para pemikir Barat pendukung utama teori ini, antara lain Walt Rostow, Samuel Huntington, Bert Hoselitz, Alex Inkeles, Roy Harrod, Evsey Domar, David McClelland, dan beberapa teoritis modernisasi lainnya (Budiman, 1995).

Sebaliknya, para sarjana beraliran kritis yang berasal dari NSB atau negara-negara pascakolonial lebih mengedepankan pribumisasi konsep modernisasi (politik) ala Barat, seperti dilakukan oleh Tariq Banuri (*Development and the Politics of Knowledge: A Critical Interpretation of the Social Role of Modernization Theories in the Development of the Third World*, 1990), Rajni Kothari (*Redesigning the Development Strategy*, 1977; *Rethinking Development: In Search of Human Alternatives*, 1989), Arjun Appadurai (*Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy*, 1990), Frederique Marglin dan Stephen Marglin (*Dominating Knowledge: Development, Culture, and Resistance*, 1990), dan Arturo Escobar (*Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*, 1995). Mereka melihat modernisasi politik lebih sebagai proyek Barat; tanpa dibaringi pendekatan berbasis nilai budaya di NSB yang relevan (Hennayake 2019: 19).

### **Konsep Pembangunan Politik**

Dalam studi pembangunan politik, *term* perubahan politik dan modernisasi politik merupakan dua isu atau variabel penting yang akan menentukan sukses tidaknya upaya pembangunan politik yang dilakukan sebuah bangsa—terutama di NSB atau di negara

pascakolonial dalam menata ulang sistem politiknya. Perubahan atau modernisasi politik merupakan elemen dasar pembentukan konsep pembangunan politik, bukan sebaliknya. Memahami pembangunan politik berarti mengkaji tentang arti ‘pembangunan’ sekaligus menelisik arti ‘politik’ dan relasinya dengan pembangunan/modernisasi (Surbakti, 1999).

Sebagai bidang kajian penting dalam ilmu politik, konseptualisasi ‘pembangunan politik’ (*political development*) memiliki arti yang berbeda dengan ‘politik pembangunan’ (*politics of development*). Jika politik pembangunan (*politics of development*) berurusan dengan isu perencanaan, pembuatan kebijakan, strategi atau implementasi program tertentu yang dibuat pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di bidang politik, maka pembangunan politik (*political development*) mengandung makna lebih luas: menyangkut segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan pemerintah atau negara untuk mengubah suatu tatanan atau kondisi politik tertentu secara mendasar menuju ke suatu tatanan/kondisi politik yang lebih rasional, sistemik, dan fungsional. Pasalnya, setiap sistem politik akan berupaya maksimal untuk mewujudkan tahap kehidupan politik masyarakat dan bangsa ke arah tatanan kepolitikan modern—yang efektif, rasional, fungsional, adaptif, terlembaga, dan integratif—dan secara eksternal dapat terhubung secara sinergis dengan lingkungan politik yang ada di luar (domestik maupun internasional) (Surbakti, 1999; Barber, 2014).

Secara lebih rinci, Barber (2014: 320) menempatkan politik pembangunan (*political of development*) sebagai: (1) rancangan kehidupan bernegara yang ditentukan oleh konteks politik melalui struktur, kebijakan, dan operasinya; (2) kebijakan yang berdimensi sangat luas, mencakup sistem, struktur, dan kebijakan pemerintahan/negara; (3) kewajiban politik pemerintah dalam memberi dorongan, motif, dan kesempatan bagi individu untuk secara aktif terlibat dalam konteks, baik secara kognitif maupun secara perilaku; (4) keteraturan yang sistematis dari keterlibatan perilaku warga negara (seperti partisipasi pemilu dalam sistem demokrasi), dimana setiap individu terprogram efektif melibatkan diri secara intens dalam politik untuk membangun identitas nasionalnya; dan (5) nilai-nilai yang didukung dan ditetapkan oleh sistem politik, struktur politik, dan aktor politik, seperti kemampuan kontrol atau regulasi yang mampu memberi akses, kesempatan, kebebasan, kesetaraan hak, penentuan nasib sendiri, dan bentuk-bentuk ekspresi politik warga negara lainnya.

Menurut Huntington (1971), juga Gaffar (1989), ditelisik secara konseptual, konsep pembangunan politik memang punya makna yang luas, yang per definisi terkait dengan aspek geografis, derivatif, teologis, dan fungsional. Secara *geografis*, pembangunan politik adalah proses perubahan politik pada negara berkembang dengan menggunakan konsep

dan metode yang pernah digunakan oleh negara maju (seperti konsep mengenai sosialisasi politik, komunikasi politik, artikulasi kepentingan, dan seterusnya).

Secara *derivatif*, pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh, meliputi modernisasi yang membawa implikasi atau konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media massa, perubahan status sosial, dan aspek-aspek lainnya. Secara *teologis*, pembangunan politik berarti proses perubahan menuju pada satu atau beberapa tujuan dari sistem politik. *Telos* atau tujuan tersebut meliputi stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, partisipasi, mobilisasi, dan sebagainya. Sementara secara *fungsiional*, pembangunan politik adalah suatu gerakan perubahan menuju sistem politik ideal yang dikembangkan oleh suatu negara menuju sistem politik yang berciri demokratis.

Dalam *The Stages of Political Development* (terbit perdana tahun 1965), Organski (2010) juga melakukan pengujian terkait kapasitas dan peran negara modern dalam proses pembangunan politik—yang menurutnya—harus melalui empat tahapapan berikut: (1) penyatuan politik nasional (*national integration*); (2) industrialisasi; (3) kesejahteraan nasional; dan (4) kelimpahan. Organski mendefinisikan pembangunan politik dalam pengertian meningkatnya efisiensi pemerintah dalam memobilisasi manusia dan sumberdaya materil untuk mencapai tujuan-tujuan utama (pembangunan politik) nasional.

Sementara C.E. Blank (1966) melukiskan fase-fase pembangunan politik sebagai salah satu upaya negara yang ingin mengintegrasikan dirinya ke tahap modernisasi untuk menghindari implikasi-implikasi evolutif yang tidak sesuai dengan perubahan yang bersifat kompleks dan akseleratif, perubahan, seperti: (1) tantangan modernisasi dari masyarakat tradisional; (2) konsolidasi kepemimpinan modern yang belum tentu sejalan dengan gaya dan pola kepemimpinan tradisional; (3) transformasi ekonomi dan masyarakat pedesaan berkultur agraris (desa) ke model industri (kota); dan (4) tantangan integrasi masyarakat agraris yang berstruktur sederhana ke masyarakat modern yang berstruktur kompleks (Umar, 2020: 8262; Sudarsono, 1982: 87).

Pada sisi lain, David Apter (1965: 67) menyajikan sebuah tipologi pemerintahan dan teori perubahan. Pendekatannya bergerak menuju bentuk analisis kebutuhan fungsional-struktural yang lebih berdaya terap, yang disesuaikan dengan analisis politik, seturut dengan analisis sosiologi Talcott Persons. Secara cerdas, Apter membedakan antara pembangunan dan modernisasi. Menurut Apter, secara umum, pembangunan adalah hasil pertumbuhan dan integrasi peran-peran fungsional dalam sebuah komunitas, sementara

modernisasi adalah satu *special case* yang hadir dalam proses pembangunan (termasuk pembangunan politik). Modernisasi menyiratkan hadirnya sebuah tatanan sosial yang dapat menemukan hal-hal baru (*social rediscovery*), seperti mendesain struktur-struktur (politik yang adaptif dan fleksibel, memrogram keterampilan dan internalisasi pengetahuan yang dibutuhkan agar setiap kelompok masyarakat dapat hidup dalam dunia dengan kemajuan teknologi. Sementara industrialisasi adalah sebuah aspek lain dari modernisasi, yakni periode di mana peran-peran masyarakat secara struktural dan fungsional dihubungkan dengan perkembangan ekonomi dan otomatisasi teknologi (Umar, 2020: 8263-8264).

Di sisi lain, proses *rediscovery* yang berlangsung dalam sistem sosial yang berciri struktural-fungsional tersebut, menurut Apter, akan memberi benefit berupa hadirnya masyarakat rasional-fungsional sebagai penopang utama demokrasi. Bagi Apter, etika dan sikap ilmiah (sebagai basis dari cara berpikir rasional dan empiris) adalah “*spirit yang mendasari sebuah ideologi untuk mendorong bentuk identitas dan solidaritas sosial baru di tengah perubahan*” (Apter, 1965: 436). Etika ilmiah didasari oleh kebutuhan pertukaran bebas antara pengetahuan, informasi, dan ragam kepentingan dalam tatanan masyarakat yang tengah menjalani proses modernisasi—dengan dukungan para teknolog dan ilmuwan sosial yang berperan sebagai mesin penggerak modernisasi (Apter, 1965: 437).

Dalam literatur ilmu politik, tentu cukup banyak variasi konsep atau definisi pembangunan politik yang dirilis oleh para ahli ilmu politik. Situasi ini menyebabkan terjadinya kesulitan konseptual dalam merumuskan definisi tunggal yang relatif sederhana; yang mencakup seluruh aspek dari fenomena pembangunan politik. Para ilmuwan politik terkemuka Indonesia, seperti Prof. Juwono Sudarsono, Prof. Mochtar Mas’oed, Prof. Yahya Muhaimin, Prof. Afan Gaffar, Prof. Ramlan Surbakti, dan beberapa lainnya yang banyak menelaah isu-isu pembangunan politik, dalam pembahasannya secara garis besar telah berupaya merangkum sejumlah definisi dan konseptualisasi pembangunan politik yang digagas oleh Lucian W. Pye, seorang ilmuwan politik Amerika, yang pemikirannya tentang *political development* banyak dirujuk oleh para ahli ilmu sosial Indonesia.

Menurut Sudarsono (1982), Gaffar (1989), Muhaimin (1995), Surbakti (1999), dan Mas’oed (1989) konsepsi dan definisi pembangunan politik sebagaimana dirumuskan Pye dalam *Aspects of Political Development* (1966), setidaknya mencakup sepuluh aspek berikut: (1) pembangunan politik sebagai prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi; (2) pembangunan politik sebagai ciri khas kehidupan politik masyarakat industri; (3) pembangunan politik sebagai modernisasi politik; (4) pembangunan politik sebagai operasi

negara-bangsa; (5) pembangunan politik sebagai pembangunan administrasi dan hukum; (6) pembangunan politik sebagai mobilisasi dan partisipasi massa; (7) pembangunan politik sebagai pembinaan dan penataan kehidupan demokrasi; (8) pembangunan politik sebagai stabilitas dan perubahan politik secara teratur; (9) pembangunan politik sebagai mobilisasi dan penguasaan; dan (10) pembangunan politik sebagai satu segi dari proses perubahan sosial (*social changes*) yang bersifat multidimensi.

Dalam kerangka ruang lingkup (*scope of political development*), pembangunan politik juga memiliki lingkup pengertian yang sangat luas, yang antara lain meliputi: (1) pembangunan sistem politik; (2) pembangunan ideologi politik; (3) pembangunan komunikasi politik; (4) pembangunan sistem pemilu (5) pembangunan partisipasi politik masyarakat; (6) pembangunan pers/media massa; (7) pembangunan aparatur administrasi pemerintahan sebagai penyelenggara politik negara; (8) pembangunan identitas bangsa (nasionalisme politik), dan (9) pembangunan manajemen politik.

Untuk memahami kerangka konseptual terpenting dari beragam cebaran definisi pembangunan politik yang ada, ada baiknya kita melihat sekilas ragam konsep *political development*. Setidaknya konsepsi pembangunan politik terpenting terdapat dalam dua karakter. *Pertama*, semangat persamaan (generalisasi), dimana dalam definisi/konsepsi pembangunan politik selalu kita temukan semangat untuk menyertakan warga negara yang berperan aktif dalam proses kehidupan politik. Generalisasi adalah prinsip universal, dapat diterapkan di semua kondisi atau proses politik yang bersifat impersonal. Generalisasi juga berarti terbukanya kesempatan bagi setiap warga negara dalam menentukan proses rekrutmen jabatan-jabatan politik dan publik dengan menggunakan standar-standar yang rasional dan obyektif, dan bukan standar yang bersifat koruptif, kolusif, dan nepotik.

*Kedua*, terkait dengan kapasitas sistem politik, karena kapasitas sistem berkaitan dengan kemampuan sistem politik (*political system capability*) dalam membuat kebijakan sebagai *output* dalam proses politik. Kapasitas juga berarti kondisi yang memengaruhi performa proses penyelenggaraan pemerintahan, efektivitas dan efisiensi dalam penerapan kebijakan publik, dan kapasitas yang berkaitan dengan rasionalitas dalam proses administrasi dan orientasi kebijakan, baik yang bersifat populis maupun elitis.

Alhasil, dari deskripsi konseptual di atas, pembangunan politik setidaknya dapat dirumuskan sebagai sebuah proses yang bersifat linear, yang dimulai dari pendekatan ekonomi pembangunan sebagai pondasi awal (atau prasyarat) menuju terciptanya stabilitas politik (*political integration/political cohesiveness*). Artinya, upaya menciptakan stabilitas



dan pencapaian prestasi ekonomi (kesejahteraan hidup masyarakat) adalah dua kata kunci yang menjadi ambisi terbesar kajian pembangunan politik. Sejauh mana jalannya pembangunan politik dalam mengantarkan stabilitas politik dan kesejahteraan negara, tentu akan sangat tergantung dari dua tujuan utama tersebut. Jika dalam praktiknya terjadi inkonsistensi di antara keduanya, maka proses pembangunan politik yang diinisiasi langsung oleh (para elite) negara hanya akan menghasilkan instabilitas politik, konflik sosial, dan berbagai bentuk tindak kekerasan massa, bahkan revolusi politik.

Jika secara konseptual kita sederhanakan, maka Organski melihat pembangunan politik sebagai efektivitas dan efisiensi pemerintah dalam memobilisasi masyarakat dan sumberdaya materil negara untuk mencapai tujuan akhir nasional: (1) melakukan integrasi nasional; (2) mewujudkan industrialisasi; (3) meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara nasional; dan (4) memasuki era kelimpahan. Berikutnya, C.E Blank lebih menitikberatkan pembangunan politik pada fase-fase berikut: (1) terpenuhinya prasyarat modernisasi; (2) konsolidasi kepemimpinan dan manajemen modern (sekaligus mereduksi kepemimpinan tradisional); (3) transformasi ekonomi dan masyarakat dari yang berciri agraris/pedesaan menuju masyarakat berciri perkotaan/industri; dan integrasi masyarakat.

Pada sisi lain, Huntington lebih meletakkan pembangunan politik pada penekanan stabilitas (*political order*) menghadapi derasnya perubahan sosial yang mengiringi derap modernisasi, yang mensyaratkan industrialisasi, pertumbuhan ekonomi, peningkatan mobilitas sosial, dan partisipasi politik; sekaligus menghindari pembusukan politik (*political decay*), semisal instabilitas politik (*political disorder*), *corruption*, otoriterisme, tindak kekerasan, kegagalan pembangunan atau mandeknya kapasitas sistem politik untuk mentransformasi berbagai tantangan modernisasi dan tuntutan perluasan partisipasi politik.

Sementara David Apter (1965: 67) menyajikan tipologi perubahan dalam konteks pembangunan politik. Dimana pembangunan politik didekati secara konseptual dengan analisis struktural-fungsional, yakni pendekatan yang bisa bergerak secara evolutif menuju kapasitas sistem politik yang diselaraskan dengan bentuk atau metode memerintah yang lebih efektif, fungsional, dan berdaya terap tinggi (*highly implemented*). Apter juga meyakini, bahwa sistem rekonsiliasi sosial akan membawa pembangunan politik pada nilai-nilai kesempurnaan tertinggi (*the highest perfection values*), yakni terbangunnya integrasi politik melalui pemurnian nilai-nilai kemanusiaan, tanpa ada lagi pengucilan individu dalam proses pembangunan politik (Apter, 1965: 426).

## **Konsep Demokrasi**

Per definisi, demokrasi berasal dari kata *demos* (baca: rakyat) dan *kratos/ cratein* (baca: kekuasaan). Sementara secara terminologis, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, yang di dalam praktiknya bisa dilaksanakan melalui mekanisme demokrasi yang bersifat langsung (*direct democracy*) maupun melalui mekanisme demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) atau demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Menurut Mayo (1960: 70):

*“Democracy is a system in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections conducted on the basis of the principle of political equality and under conditions of political freedom”* (Demokrasi adalah sistem dimana kebijakan publik dibuat atas dasar mayoritas, oleh perwakilan yang tunduk pada kontrol rakyat yang efektif pada pemilihan berkala yang dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan politik dan di bawah kondisi kebebasan politik).

Istilah demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Yunani klasik, Aristoteles ( $\pm$  384-322 SM). Istilah ini oleh Aristoteles dimaksudkan sebagai suatu bentuk pemerintahan yang meyakini bahwa kekuasaan harus berada di tangan rakyat (*power must be in the hands of the people*). Namun, pada awal perkembangannya, demokrasi dianggap sebagai konsep negara yang buruk menurut para filsuf Yunani klasik. Socrates ( $\pm$  470–399 SM) misalnya, menolak ide demokrasi, saat pemerintah Athena menjalankan sistem demokrasi. Bagi Socrates, hanya orang-orang bijak (baca: para filosof; cerdik pandai; kaum bijak) yang punya kapasitas untuk menjalankan pemerintahan yang baik. Socrates tak hanya menolak demokrasi, melainkan juga menolak sistem pemerintahan lain yang tidak melibatkan peran filosof, cerdik pandai atau orang-orang bijak (Sabine, 1981).

Murid Socrates, Plato ( $\pm$  428–348 SM), sejak awal sudah menolak ide demokrasi. Dilatari oleh kehancuran negara polis Athena, Plato menolak demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang jauh dari stabil. Bagi Plato, demokrasi adalah pemerintahan yang dipimpin oleh orang bodoh, karena setiap orang memiliki kedaulatan dan hak-hak politik. Demokrasi adalah sistem pemerintahan kacau dan anarkis. Murid Plato, Aristoteles, juga memandang negatif sistem demokrasi. Pemerintahan demokratis bukanlah sesuatu yang ideal. Kebebasan yang dimiliki oleh banyak orang berpeluang besar untuk dikuasai oleh amarah, dan hanya akan membuat keputusan yang menyesatkan (Sabine, 1981).

Pasca penerapan sistem ‘demokrasi langsung’ (*direct democracy*) yang pernah dipraktikkan oleh penguasa Athena (di era Yunani kuno), dapat dikatakan nilai dan sistem demokrasi mati suri, ditelan oleh praktik politik tirani dan otokrasi. 1.500 tahun setelah sistem demokrasi langsung (*direct democracy*) bertahta di negara polis, Athena, sistem demokrasi kemudian runtuh. Ide demokrasi baru kemudian digagas dan diperbicangkan

kembali oleh para pemikir abad pertengahan. Kendati demikian, di abad pertengahan, secara umum ide demokrasi masih mengalami nasib naas, tersungkur oleh kekuasaan yang terpusat di tangan para penguasa tiran (*absolute power*) (Sabine, 1981).

Ide demokrasi mulai diminati kembali pada masa negara Prusia di era Niccolo Machiavelli (1469-1527, dalam karyanya, *Il Principe*) dan Thomas Hobbes (1588-1679, dalam karyanya, *de Cive*). Berikutnya, gagasan demokrasi yang kian mendapat angin segar dengan hadirnya ide-ide politik dari John Locke (1632-1794, dalam karyanya, *Two Treatises Goverenment*), Baron de Montesquieu (1689-1755, dalam karyanya, *Spirit of Law*), dan J.J. Rousseau (1712-1778, dalam karyanya, *Social Contract*). Sebagai sebuah konsepsi politik alternatif dalam pengaturan negara, demokrasi makin dipercaya sebagai mekanisme atau tata kelola politik untuk mencapai negara ideal yang diidam-idamkan oleh banyak orang di dunia. Demokrasi makin meraih momentum keemasan ketika konsep politik negara modern ini diikuti oleh nilai-nilai liberalisme, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan ekonomi yang seluas-luasnya, atau *free market liberalism* (sebagai nilai dasar dari faham kapitalisme) (Sabine, 1981).

Dalam perjalanan panjangnya, sebagai konsep politik alternatif, demokrasi juga mengalami perluasan pengertian. Abraham Lincoln misalnya—dalam pidatonya yang amat masyur di Gettysburg—mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*by the people, from the people, and to the people*). Seperti konsep demokrasi awal yang digagas para filsuf Yunani klasik, bagi Lincoln, kekuasaan tertinggi pemerintahan (negara) wajib berada di tangan rakyat. Sementara Charles Costello mendefinisikan demokrasi sebagai “*sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara*” (Budiardjo, 2015).

Berikutnya, John L. Esposito mendefinisikan demokrasi sebagai “*kekuasaan dari dan untuk rakyat ... dimana seluruh lapisan masyarakat atau warga negara berhak untuk berpartisipasi, baik dalam bentuk keterlibatan aktif maupun dalam mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif*” (Budiardjo, 2015).

Di sisi lain, Hans Kelsen mendefinisikan demokrasi sebagai “*pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat ... dimana pelaksana kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih dan diyakini oleh rakyat ... bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara*” (Budiardjo, 2015).

Sementara Sidney Hook mendefinisikan demokrasi sebagai “*bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa*” (Surbakti, 1999).

Berbeda dengan para pakar politik di atas, dengan menimba inspirasi konseptual dari Huntington, Domínguez (2011: 19) memahami demokrasi sebagai “*satu perbedaan politik paling penting di antara negara-negara bukan menyangkut bentuk pemerintahan mereka, tetapi kemampuan negara dalam meningkatkan kualitas pemerintahan. Perbedaan antara demokrasi dan kediktatoran lebih kecil daripada perbedaan antara negara-negara yang politiknya mewujudkan konsensus, komunitas, legitimasi, organisasi, efektivitas, stabilitas, dan negara-negara yang politiknya kurang dalam kualitas-kualitas ini.*”

Namun demikian, dalam perkembangan berikutnya, konsep dan praktik demokrasi hanya akan bekerja efektif jika para elite dan penguasa negara serta warga negara memiliki tingkat kesadaran, pengetahuan, adaptasi, dan akseptabilitas yang tinggi dalam menerima berbagai perbedaan dan perubahan, baik dalam tataran nilai maupun struktural/sistemik, sebagai prasyarat dasar demokrasi. Dalam konteks ini, setiap negara yang ingin melakukan berbagai terobosan dan mengefektifkan demokrasi dalam kehidupan politiknya, harus cerdas dalam menempatkan konsep, sistem, struktur, dan mekanisme demokrasinya, yang sesuai dengan nilai dan karakteristik budaya politik masyarakat dan bangsa bersangkutan.

Misalnya, bagaimana menempatkan konsep dan sistem demokrasi—seperti bentuk demokrasi yang bersifat langsung (*direct democracy*) atau tidak langsung (*indirect democracy*)—ke dalam kehidupan politik dengan mempertimbangkan aspek nilai, karakter, dan budaya politik. Demokrasi langsung (*direct democracy*) misalnya, merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan; atau rakyat memiliki pengaruh langsung terhadap pengambilan keputusan politik. Di era modern, sistem ini dianggap tidak praktis karena umumnya suatu populasi negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat ke dalam satu forum pemilihan umum (*election*) adalah mustahil. Selain itu, sistem demokrasi langsung menuntut tingkat partisipasi dan ketesertaan politik yang tinggi dari rakyat dalam proses pemilu atau referendum nasional, sementara rakyat cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari setiap fenomena atau permasalahan politik yang terjadi di dalam negara.

Di sisi lain, demokrasi perwakilan (*representative democracy*) merupakan bentuk demokrasi yang tata cara, mekanisme, dan prosedur pelaksanaannya dilakukan oleh warga

negara (masyarakat sipil) dalam setiap pemilu (atau referendum) sebagai sarana untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, dan pengambilan keputusan tertinggi negara (Budiardjo, 2015). Faktual, di negara-negara modern saat ini sulit kita temukan negara yang mengembangkan model demokrasi tidak langsung seperti lembaga 'ecclesia' di Athena, Yunani dimana praktik demokrasi di negara-kota menggunakan sistem pemilihan langsung karena demokrasi adalah sarana pertemuan warga untuk membahas masalah bersama. Namun, saat ini, hampir bisa dipastikan, di semua negara di dunia mengadopsi model lembaga perwakilan sebagai instrumen representasi yang mengelola pemerintahan. Praktik politik inilah yang menjadi pembeda di antara sistem demokrasi langsung versi negara-kota dengan demokrasi perwakilan versi negara-bangsa (Saragih, 1988: 79).

Pada sisi lain, efektivitas implementasi demokrasi juga sangat ditentukan oleh ciri budaya politik yang berkembang sebagai acuan nilai dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, budaya politik yang berkembang dalam masyarakat (terutama di NSB atau negara pascakolonial) didominasi oleh budaya politik apatis (acuh; pasif) dan budaya politik termobilisasi (bentuk partisipasi politiknya didorong atau dimobilisasi oleh pemerintah, kelompok tertentu, atau elite politik). Artinya, budaya politik di NSB belum sepenuhnya masuk ke dalam kategori budaya politik rasional yang partisipatif, kritis, dan adaptif.

Menurut Almond dan Verba, setidaknya terdapat tiga klasifikasi budaya politik:

- (a) *Budaya politik parokial*: (1) umumnya terdapat pada masyarakat suku pedalaman di Afrika, Asia-Pasifik, dan Amerika Selatan; (2) tidak ada peran-peran politik yang bersifat khusus bagi anggota masyarakat; (3) peran-peran yang dipancarkan oleh pemimpinnya ini tidak dapat dipisahkan; dan (4) frekuensi orientasi terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol (tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut).
- (b) *Budaya politik subjek*: (1) adanya frekuensi orientasi yang cukup tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan obyek *output* (pemahaman mengenai pengambilan keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah) dari masyarakat atau warga negara; dan (2) sudah ada pengetahuan yang memadai tentang sistem politik secara umum serta proses penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
- (c) *Budaya politik partisipan*: (1) bentuk budaya politik dimana setiap warga negara punya pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik; (2) memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum; dan (3)

masyarakat cenderung diarahkan untuk melakukan peran politik individual secara lebih aktif, efektif, kolektif, dan progresif (Mas' oed & McAndrews, 2000).

Efektivitas demokrasi juga sangat ditentukan oleh bentuk/jenis pemerintahan serta sifat/karakteristik demokrasi yang dipraktikan (yang tentu disesuaikan dengan ideologi atau konstitusi) negara bersangkutan. Misalnya, efektivitas implementasi demokrasi akan berlangsung lebih baik di negara yang berbentuk republik (seperti Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Itali, India, Afrika Selatan atau Indonesia) dibanding negara yang berbentuk kerajaan (monarki konstitusional). Namun, sejak PD ke-2, fenomena demokrasi dunia menunjukkan bahwa sistem monarki konstitusional yang diterapkan oleh banyak negara di dunia ternyata juga memiliki kinerja sistem demokrasi yang baik dan mapan, seperti demokrasi di Inggris, Swedia, Norwegia, Denmark, Monaco, Jepang, Thailand, dan di negara-negara dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional lainnya.

Dan terakhir, kinerja demokrasi yang efektif juga kerap dikaitkan dengan ideologi politik atau faham ekonomi yang dianut oleh negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi, seperti demokrasi dengan ciri sosialisme atau demokrasi rakyat (seperti terlihat dalam karakteristik demokrasi di Rusia, China, Korea Utara, Vietnam, Bolivia atau Mexico), demokrasi dengan ciri liberalis-kapitalistik (seperti watak demokrasi di Amerika Serikat atau Inggris), demokrasi dengan ciri kultural (seperti sifat demokrasi di Jepang atau Korea Selatan), demokrasi dengan ciri agama/teokrasi (seperti watak demokrasi di negara-negara Timur Tengah, Asia Timur, dan Afrika Barat Daya), dan 'demokrasi Pancasila', sebuah ciri demokrasi unik dan *genuine* yang dianut Indonesia.

### **Varian Demokrasi Asia**

Sub bahasan di akhir tulisan ini mencoba menukil secara ringkas perkembangan dan dinamika demokrasi di negara-negara Asia. Cabaran perkembangan demokrasi di Asia ini, terutama dinamika demokrasi di Asia Tenggara, dilatari oleh temuan studi demokrasi Asia dari Clark D. Neher dan Ross Marlay (1995). Kedua gurubesar politik dari Northern Illinois University dan Arkansas State University ini menyebut temuan risetnya sebagai 'konsep demokrasi ala Asia' (*Asian-Style Democracy/ASD*). Konsep ASD versi Neher dan Marlay ini setidaknya bisa kita gunakan untuk memahami secara lebih utuh perbedaan demokrasi di Asia dengan demokrasi-demokrasi yang tumbuh terlebih dahulu di Eropa dan Amerika. Mengutip Hariej (1997: 60), perilaku politik negara-negara dalam radar ASD, sejal lama sesungguhnya juga belangsung intens di beberapa negara semi demokratis Asia lainnya, seperti Jepang, Korea Selatan, India, Pakistan, dan Sri Lanka.

Pertanyaannya, kenapa demokrasi Barat dalam tataran implementasi menjadi berbeda dengan demokrasi ala Asia (ASD)? Menurut Neher dan Marlay ASD diperlukan karena rata-rata negara-negara Asia, terutama di Asia Tenggara—sejak lepas dari jerat kolonialisme dan rezim sipil (maupun militer) otoriter—terus menghadapi berbagai isu politik pelik, diantaranya: isu pembangunan ekonomi, isu keamanan nasional, isu pelembagaan politik, dan isu integrasi nasional. Dikhawatirkan bila demokrasi ala Barat diterapkan secara konsisten, ketiga masalah pelik itu akan sulit diatasi. Neher dan Marlay setidaknya berhasil mengidentifikasi enam unsur penting yang membedakan demokrasi Asia dengan demokrasi Barat, yakni: konfusianisme, hubungan patron-klien, personalitas, otoritas, dominasi partai tunggal, dan posisi negara yang (terlampau) kuat.

Konfusianisme misalnya, memiliki pengaruh besar pada budaya politik di Cina, Jepang, Korea, Vietnam, dan Singapura. Prinsip budaya politik ini menekankan harmoni, stabilitas, dan konsensus. Strata sosial, hirarki politik, dan posisi ekonomi kental mewarnai kehidupan sosial. Kekuasaan, wewenang, dan legitimasi politik yang dinikmati penguasa tabu untuk di soal. Budaya politik ini meyakini kekuasaan adalah anugerah ‘langit’ pada penguasa. Karenanya, mengkritik pemerintah bukanlah hal bijak (Zhang, 2017).

Pun hubungan patron-klien inheren dalam kultur politik di sebagian besar negara di Asia. Interaksi antar individu dengan semangat egalitarian—seperti yang berlangsung dalam praktik politik demokrasi di Barat—diinterupsi oleh hubungan timpang antara sang patron dan kliennya (*clientistic political relation*). Begitupun proses komunikasi politik—di alam demokrasi Barat bersifat terbuka dan imparial—sangat ditentukan oleh otoritas individu dan wewenang personal. Di sini, politik berarti membuat kontak pribadi, jalur khusus yang tertutup dari sorotan publik. Bahkan kontak pribadi—bisa karena hubungan darah, suku, daerah, almamater, dan seterusnya—menggantikan peran instiusi-institusi politik formal dalam penentuan kebijakan (Hariej, 1997: 61; Dirk & Andreas, 2015).

Secara umum, kekuasaan politik di negara-negara Asia dikendalikan oleh partai politik secara elitis dan sentralistis oleh para elite dominan. Partai-partai dominan itu umumnya dipimpin secara turun-temurun dan didominasi oleh keluarga/kerabat elite dominan. Beberapa diantaranya adalah Partai Kongres India (Indian National Congress), Partai Demokrasi Liberal (Liberal Democratic Party/LDP) di Jepang, Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu (United Malays National Organisation/UMNO) di Malaysia, Partai Aksi Rakyat (People's Action Party/PAP) di Singapura, Partai Demokrat (Democrat Party) di Thailand, Partai Demokratik Filipina (Partido Demokratiko Pilipino-Lakas ng

Bayan/PDP) di Filipina, Partai Komunis Vietnam (Dang Cong san Viet Nam/DCSVN) di Vietnam, dan (Partai) Golkar di Indonesia (lihat Manikas & Thornton, 2003; Ufen, 2007; Hofmann, 2009; Tomsa & Ufen, 2015; Kasuya & Sawasdee, 2019).

Pada kasus yang ekstrim, partai-partai dominan ini (sekedar) digunakan pemerintah untuk meraih legitimasi, melalui desain kemenangan besar-besaran dalam pemilu. Tragisnya, setelah meraih kemenangan, para wakil politik dari partai dominan, termasuk partai oposisi di parlemen, sulit bertindak sebagai kekuatan penyeimbang. Mereka harus tunduk pada kepentingan pemerintah. Jika tidak, maka anggota parlemen akan menghadapi berbagai bentuk ancaman, diskriminasi, dan marjinalisasi politik (Rich, 2013). Dalam kasus yang berbeda, penundukan para politisi idealis di parlemen—termasuk kekuatan non-partisan, seperti para tokoh dan pemuka masyarakat di tingkat akar rumput—biasanya dilakukan pemerintah melalui partonase politik, hibah sosial, pemberian konsesi bisnis, atau disertakan dalam pengelolaan sumberdaya strategis di tingkat lokal (Winters, 2016)

Pemerintah—dan kekuasaan politik negara yang didominasinya—memiliki kekuatan sangat besar untuk mengooptasi kelompok-kelompok non-negara, tak hanya sebatas partai politik, namun juga para pelaku bisnis, asosiasi pedagang, serikat buruh, serikat petani, perhimpunan mahasiswa, kelompok kepentingan, kelompok penekan atau kelompok strategis lainnya. Negara menjadi aktor utama dalam pembangunan ekonomi, baik sekedar membuat kebijakan-kebijakan yang menentukan arah perekonomian maupun dalam bentuk investasi langsung dalam berbagai proyek strategis, pusat maupun daerah. Penguatan posisi dan peran negara akan selalu dibenarkan dengan alasan: ‘demi suksesnya program pembangunan ekonomi dan stabilitas politik nasional’ (Hariej, 1997: 61; Mas'oed, 1989).

Membahas demokrasi—sebagai prosedur pengendalian politik negara dan kontrol kekuasaan paling kenyal saat ini—pada dasarnya lebih luas dan sekedar prosedur legal atau perimbangan kekuatan (*check and balances*) antara kekuatan negara dan (kontrol politik dan partisipasi) masyarakat. Namun, membahas demokrasi juga haruslah menyertakan nilai-nilai, semangat, dan jiwa. Di sini (ber)demokrasi berarti ada kesediaan dari tiap-tiap individu untuk hidup bertoleransi, berkompromi, dan berkompetisi. Penyelenggara negara juga harus siap menghormati aturan main yang telah disepakati, menghargai pendapat rakyat, siap menerima kritik, bersikap melayani, mengayomi, dan imparsial serta siap bertanggung jawab menerima sanksi/konsekuensi administratif maupun hukum atas tugas dan tanggung jawab yang diembannya (selaku elite politik atau pejabat publik). Menengok perjalanan sejarah demokrasi di sejumlah negara, demokrasi di bekerja di negara tersebut



bekerja efektif karena antara penguasa dan rakyat tau dan paham arti penting demokrasi, dan konsisten menggunakan mekanisme demokrasi untuk menyelesaikan perselisihan yang ada. Sayangnya pemahaman demokrasi seperti ini yang kerap ditinggalkan penguasa politik di banyak negara di dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara.

Boleh jadi, untuk kasus perkembangan demokrasi di negara-negara Asia Tenggara, hubungan antara pembangunan ekonomi dan ketatnya stabilitas politik dalam kerangka modernisasi dan pembangunan politik memang agak sulit untuk dipertemukan, kendati jika kita cermati, ada tren dimana keterbukaan politik yang berlangsung di Indonesia, Thailand, Singapura, dan Malaysia misalnya, relatif berhasil mendorong pembangunan ekonomi, tumbuhnya kesejahteraan, melebarnya katup demokrasi—sepanjang disyarati oleh kondisi tertentu. Kondisi tertentu itu diantaranya adalah munculnya kelompok-kelompok sosial, ekonomi, dan politik progresif serta tampilnya ragam asosiasi profesional dan fungsional yang berkepentingan terhadap demokrasi. Riuhnya penggunaan teknologi media sosial dalam beberapa dekade terakhir juga kian memperkuat kontrol dan sikap kritis publik.

Namun, secara akademis, yang relatif sulit untuk didalilkan, justru ketika periode ‘demokratisasi gelombang ketiga’ (meminjam tesis Huntington) mulai bergerak dinamis di banyak negara di dunia, termasuk di Asia Tenggara, namun—dalam beberapa periode terakhir—demokrasi seakan berputar balik ke pendulum awal: tampilnya kembali wajah politik otoriter, menguatnya kekuasaan anti kritik, derasnya politik rente dan oligarki bisnis serta mengentalnya perilaku anti demokrasi di banyak rezim politik yang dibarengi dengan peningkatan jumlah orang miskin secara ekstrim; seperti yang terjadi di Indonesia, Myanmar, dan Filipina hari-hari ini.

## **SIMPULAN**

Dari pembahasan terkait konsep dan isu modernisasi politik, pembangunan politik, dan demokrasi seperti telah dipaparkan, dapat disimpulkan beberapa pokok pemikiran berikut. *Pertama*, secara konseptual modernisasi politik dan pembangunan adalah bagian proyek demokratisasi global. Modernisasi politik adalah konsep bias Barat yang banyak digunakan untuk menganalisis sebagai cara pandang atau perspektif untuk mengubah *mind set* (sistem, struktur, kultur, dan kebijakan) politik masyarakat dari cara pandang politik tradisional menuju masyarakat dengan cara pandang politik yang rasional-modern.

*Kedua*, masalah utama yang kerap muncul dari proses modernisasi politik adalah: (a) kesiapan sistem politik dalam mengadaptasi berbagai proses perubahan (baik internal maupun eksternal) yang berlangsung dalam proses modernisasi politik; (b) hadirnya

prasyarat, seperti rasionalisasi kekuasaan, pergantian sejumlah besar pejabat-pejabat politik tradisional (yang legitimasinya berbasis etnis, keagamaan, dan kekeluargaan) oleh otoritas kekuasaan nasional yang legitimasinya berbasis rasionalitas dan sekuler.

*Ketiga*, proyek modernisasi politik akan selalu membawa dampak ikutan, seperti: (a) ketegangan dan konflik, karena proses modernisasi politik di satu sisi mensyaratkan adanya perubahan kelembagaan sistem politik secara dramatis; memastikan sistem politik baru bisa menjaga stabilitas, kohesifitas, dan integrasi dalam dinamika kehidupan sistem politik; dan (b) ketegangan dan konflik merupakan sesuatu inheren dalam proses modernisasi politik, antara lain dicirikan oleh tuntutan persamaan hak-hak politik bagi setiap warga negara, berlangsungnya proses spesialisasi politik dan diferensiasi sosial secara intens, serta peningkatan kapasitas sistem politik untuk mengakomodir ragam tuntutan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat yang berkembang kian rumit dan kompleks.

*Keempat*, pembangunan politik merupakan proses politik yang kompleks, yang melibatkan diferensiasi, spesialisasi, dan integrasi. Pembangunan politik juga ditandai oleh tingkat partisipasi politik masyarakat, melalui kontrol/pengawasan masyarakat terhadap pemerintah/penguasa; dimana warga negara secara langsung terlibat dalam memengaruhi kebijakan pemerintahan. Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, pembangunan politik adalah: (a) prasyarat penting bagi pembangunan ekonomi; (b) sebagai ciri khas kehidupan politik masyarakat industri; (c) sebagai bentuk modernisasi politik; (d) sebagai mekanisme operasi negara bangsa yang rasional; (e) sebagai pola penataan pembangunan administrasi dan hukum; (f) sebagai mekanisme dalam mobilisasi dan mendorong partisipasi massa; (g) sebagai sarana efektif dalam pembinaan demokrasi; (h) sebagai instrumen dalam menata stabilitas dan perubahan yang teratur; (i) sebagai manajemen untuk mobilisasi dan memonopoli kekuasaan nasional; dan (j) sebagai satu segi proses perubahan sosial yang bersifat multidimensional

*Kelima*, konsep dan praktik demokrasi hanya akan efektif jika penguasa negara serta warga negara memiliki tingkat kesadaran, pengetahuan, adaptasi, dan akseptabilitas dalam menerima berbagai perbedaan dan perubahan. Demokrasi juga mensyaratkan kecerdasan setiap negara dalam mengefektifkan sistem demokrasi dalam kehidupan politiknya. Demokrasi terdiri dari dua bentuk, yakni demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Efektivitas daya terap demokrasi juga ditentukan oleh karakteristik budaya politik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yakni: (a) *budaya politik apatis*; dan (b) *budaya politik mobilisasi*. Bagi

Almond dan Verba, secara umum budaya politik dapat diklasifikasi ke dalam tiga jenis: *budaya politik parokial*; *budaya politik subjek*; dan *budaya politik partisipan*. Efektivitas demokrasi juga sangat ditentukan oleh bentuk pemerintahan serta karakteristik demokrasi yang dipraktikkan oleh negara bersangkutan. Dan terakhir, kinerja demokrasi yang efektif juga harus dikaitkan dengan ideologi politik atau paham ekonomi yang dianut oleh negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi pada lingkup negaranya.

Kajian ini merekomendasi beberapa hal berikut: (a) modernisasi yang berlangsung dalam kehidupan politik negara harus mengacu pada karakteristik budaya, ideologi, dan kearifan lokal yang berbeda di masing-masing negara—tidak linear, general, universal, dan bias Barat; (b) pembangunan politik juga harus berangkat dari nilai-nilai lokal, yang adaptif dengan nilai-budaya politik bangsa bersangkutan, bukan sekedar mengadopsi dan menduplikasi pemikiran Barat, yang dalam tradisi pemikiran kritis (post-kolonialis atau post-strukturalis) terbukti subjektif, hegemonik, dikotomis, apriori, dan reduksionis; dan (c) konsep, nilai, dan semangat demokrasi harus dibangun berdasarkan orientasi, spirit, dan komitmen lokalistik, yang secara ideologis relevan dengan kultur dan natur bangsa bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan konflik dan ketegangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alavi, Hamza. 1972. The state in postcolonial societies: Pakistan and Bangladesh. *New Left Review*, 74(1), 59-81. <https://doi.org/info:doi/>
- Apter, David E. 1965. *The politics of modernization*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Armer, J. Michael, & Katsillis, John. 1992. "Modernization Theory", in Borgatta, Edgar, & Borgatta, Marie L. (eds.). *Encyclopedia of Sociology*, 3 (pp. 1299–1304). New York: Macmillan.
- Arts, B.J.M., & Tatenhove, Jan P.M. Van. 2006. "Chapter II: Political modernization", in Arts, Bas, & Leroy, Pieter (eds.). *Institutional dynamics in environmental governance* (pp. 21-43). Netherlands: Springer.
- Barber, Brian K. 2014. The politics of development. *Human Development*, 57(6), 319-321. DOI: 10.1159/000369328.
- Bertens, Kees. 1981. *Ringkasan sejarah filsafat*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Browning, Gary Keith. 2017. *A history of modern political thought: The question of interpretation*. Oxford, USA: Oxford University Press.
- Budiardjo, Miriam. 2015. *Dasar-dasar ilmu politik*. Edisi Revisi: Cetakan Ketiga. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman, Arief. 1995. *Teori pembangunan dunia ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Domínguez, Jorge I. 2001. "Samuel Huntington and the Latin American State", in Angel Castelo, Miguel, & Alves, Fernando Lopez (eds.). *The other mirror: Grand theory*

- through the lens of Latin America* (pp. 2019-239). Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Gaffar, Afan. 1989. *Beberapa aspek pembangunan politik*. Cetakan 2. Jakarta: Rajawali.
- Girifalco, Louis. 2007. *Scientific Truth*. Retrieved from <https://oxford-universitypress-scholarship-com.translate.goog/view/10.1093/acprof> (Accessed: June 3, 2022).
- Hardiman, Fransisco Budi. 2004. *Filsafat modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Cetakan I. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hariej, Eric. 1997. (Tidak) demokratis ala Asia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2), 57-63. <https://doi.org/10.22146/jsp.111174>.
- Harjanto, Nicolaus Teguh Budi (eds.). 1997. *Memajukan demokrasi mencegah disintegrasi: Sebuah wacana pembangunan politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hasan, Nazmul. 2021. Political modernization in the developing countries: Challenges and prospects. *Asian Journal of Social Sciences and Legal Studies*, 3(3), 41-48. <https://doi.org/10.34104/ajssls.021.041048>.
- Hennayake, Nalani M. 2019. The postcolonial state, power politics and indigenous development as a discourse of power in Sri Lanka. *Sri Lanka Journal of Sociology*, Vol. 01, 17-48. <https://arts.pdn.ac.lk/socio/research/pdf/02NalaniHennayake.pdf>.
- Hofmann, Norbert von. 2009. *Social Democratic Parties in Southeast Asia - Chances and Limits*. Retrieved from <https://library.fes.de/pdf-files/iez/06070.pdf> (Accessed: June 5, 2022).
- Huntington, Samuel P. 1971. The Change to change: Modernization, development, and politics. *Comparative Politics*, 3(3), 283-322. <https://doi.org/10.2307/421470>.
- Huntington, Samuel P., & Nelson, Joan M. 1976. *No easy choice, political participation in developing countries*. Cambridge: Harvard University Press.
- Huntington, Samuel P. 1995. *Gelombang demokratisasi ketiga* (Judul Asli: *The third wave: Democratization in the late twentieth century*, 1991). Alih Bahasa Asril Marjohan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Indian Institute of Legal Studies (n.d). *Political Modernization and Its Dimensions*. Retrieved from <https://www.iilsindia.com/blogs/political-modernisation-dimensions/> (Accessed: May 28, 2022).
- Jati, Wasisto Rahardjo. 2013. Mengurai gagasan negara pascakolonial: Kontekstualisasi Indonesia sebagai negara dunia ketiga. *Masyarakat Indonesia*, 39(1), 133-156. <https://doi.org/10.14203/jmi.v39i1.296>.
- Kasuya, Yuko, & Sawasdee, Siripan Nogsuan. 2019. The transformation of dominant parties in Asia: Introduction to the special issue. *Asian Journal of Comparative Politics*, 4(1), 3-7. <https://doi.org/10.1177/2057891119831470>.
- Krishan, Kumar. 2020. "Modernization" (in *Encyclopedia Britannica*). Retrieved from <https://www.britannica.com/topic/modernization> (Accessed: June 5, 2022).
- Manikas, Peter M. & Thornton, Laura L. (eds.). 2003. *Political parties in Asia promoting reform and combating corruption in eight countries*. Washington, DC: National Democratic Institute for International Affairs.
- Mas'ood, Mochtar. 1989. *Ekonomi dan struktur politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES.

- Mas'ood, Mochtar, & McAndrews, Colin (eds). 2000. *Perbandingan Sistem Politik*. Cetakan ke-15. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mayo, Henry B. 1960. *An introduction to democratic theory*. New York: Oxford University Press.
- Muhaimin, Yahya, & Colin McAndrews (eds.). 1995. *Masalah-masalah pembangunan politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mustansyir, Rizal. 1997. Aliran-aliran metafisika (Studi kritis filsafat ilmu). *Jurnal Filsafat*, Seri 28, 1-14. <https://doi.org/10.22146/jf.31657>.
- Nazir, M. 1988. *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Neher, Clark D., & Marlay, Ross. 1995. *Democracy and development in Southeast Asia: The winds of change*. New York, NY: Routledge.
- Organski, A.F.K. 2010. *Tahap-tahap pembangunan politik*. Edisi Revisi: Cetakan kedua. Jakarta: Akademika Pressindo.
- “Overview Political Development” (n.d). Retrieved from [https://www-oxfordreference-com.translate.goog/view/10.1093/oi/authority.20110803100334639?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=sc](https://www-oxfordreference-com.translate.goog/view/10.1093/oi/authority.20110803100334639?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc) (Accessed: May 30, 2022).
- Pooja (n.d). *Political System: Meaning and Characteristics of a Political System*. Retrieved from <https://www.politicalsciencenotes.com/articles/political-system-meaning-and-characteristics-of-a-political-system/356> Accessed: May 30, 2022).
- Pye, Lucian W. 1966. *Aspects of political development: An analytic study* (The Little Brown Series in Comparative Politics). Boston: Little Brown.
- Pye, Lucian W. 1979. “Political modernization: Gaps between theory and reality”, in *The human dimension of foreign policy: An American perspective*. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 442, March Edition, 1979 (pp. 28–39). <http://www.jstor.org/stable/104347>.
- Rich, Roland. 2013. *Parties and parliaments in Southeast Asia non-partisan chambers in Indonesia, the Philippines and Thailand*. London; New York: Routledge.
- Rustow, Dankwart A. 1968. Modernization and comparative politics: Prospects in research and theory. *Comparative Politics*, 1(1), 37-51. <https://doi.org/10.2307/421374>.
- Sabine, George H. 1981. *Teori-Teori Politik* (2). Bandung: Binacipta.
- Saragih, Bintan R. 1988. *Lembaga perwakilan dan pemilihan umum di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sudarsono, Juwono (eds.). 1982. *Pembangunan politik dan perubahan politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sugiyono. 2005. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami ilmu politik*. Cetakan Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suwarsono, & So, Alvin Y. 2006. *Perubahan sosial dan pembangunan di Indonesia: Teori-teori modernisasi, dependensi dan sistem dunia*. Jakarta: LP3ES.
- Tomsa, Dirk, & Ufen, Andreas (eds.). 2015. *Party politics in Southeast Asia: Clientelism and Electoral Competition in Indonesia, Thailand and the Philippines*. New York, NY: Routledge.
- Turner, William. 2016. *History of Philosophy*. London: Forgotten Books.

- Ufen, Andreas. 2007. *Political party and party system institutionalisation in Southeast Asia: A Comparison of Indonesia, the Philippines, and Thailand*. GIGA Working Papers. Retrieved from <https://www.files.ethz.ch/isn/47085/wp44.pdf> (Accessed: June 5, 2022).
- Umar, Harun. 2020. Pembangunan politik dan teoritis. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 41(70). 8257-8274. <http://dx.doi.org/10.47313/jib.v41i70.926>.
- Ward, Robert E., & Rustow, Dankwart A. (eds.). 1964: *Political modernization in Japan and Turkey*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Welch, Claude Emerson. 1971. *Political modernization: A reader in comparative political change*. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.
- Whitney, Frederick Lamson. 1960. *The element of research*. New York: Prentice-Hall, Inc.
- Winters, Jeffrey A. 2016. Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 5(3), 405-409. DOI: 10.1080/00074918.2016.1236653.
- Zhang, Shanruo Ning. 2016. *Confucianism in contemporary Chinese politics: An actionable account of authoritarian political culture (Challenges facing Chinese political development)*. Lanham, MD, and Oxford: Lexington Books.